

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Setelah mengkaji dari setiap proses dalam penelitian ini, maka dihasilkan angka-angka serta paparan penjelasan yang menunjukkan kesimpulan. Selanjutnya dengan perolehan data yang telah melalui beberapa proses pengolahan didapat beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah

Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam rentang kategori sangat baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor dari responden berupa persentase sebesar 83,28%. Apabila persentase tersebut dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya di bab 3, nilai tersebut berada pada rentang skor 81% - 100% yaitu rentang kategori sangat baik.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada dalam rentang kategori baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor dari responden berupa persentase sebesar 75,38%. Dengan melihat kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya pada bab 3, maka Transparansi

dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut termasuk dalam kriteria kuat yaitu berkisar antara 61% - 80%.

3. Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah (AKD) yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat baik. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan, penilaian responden terhadap Akuntansi Keuangan Daerah pada Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Barat nilai yang diperoleh adalah sebesar 83,28% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Maka hal ini akan sesuai dan berbanding lurus dengan kuatnya Tingkat Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berada pada rentang kategori baik. Hal ini terbukti dengan diperolehnya skor dari responden berupa persentase sebesar 75,38%. Maka Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut termasuk dalam kriteria kuat yaitu berkisar antara 61% - 80%.

Berbanding lurusnya antara penerapan Akuntansi Keuangan Daerah yang sangat baik dengan kuatnya Transparansi dan Akuntabilitas dari Laporan Keuangan sudah sesuai dengan paparan yang dikemukakan oleh Fajar Ariwibowo (2007) bahwa partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan atas Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Perlu adanya perbaikan sistem rotasi pegawai, sebaiknya penempatan pegawai harus sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak secara terus menerus merotasi pegawai tanpa memperhatikan kemampuan yang dimilikinya yang akibatnya pegawai tidak akan bisa bersikap profesional atau bertanggungjawab terhadap pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Rotasi akan berjalan dengan baik jika semua pegawai sudah mempunyai kemampuan yang merata di semua bidang pekerjaan dengan sama baiknya.
2. Sebaiknya Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengakses atau membutuhkan data keuangan seperti laporan keuangan ataupun data-data lainnya. Dengan lebih serius lagi mengelola website milik Pemprov Jabar sehingga semua data laporan keuangan bisa dimasukkan ke dalam website tersebut. Karena sebagai apapun laporan keuangan dibuat tetapi kalau akses untuk mendapatkan laporan keuangan tersebut masih sulit maka belum dapat dikatakan akuntabel dan transparan (Budi Mulyana, 2006).
3. Berkaitan dengan ketepatan waktu dalam penyusunan laporan ataupun penyajian laporan, ternyata persentase yang didapat dari jawaban responden cukup rendah di bawah 70%. Disini dapat dilihat bahwa sering

ada keterlambatan dalam penyusunan laporan. Oleh karena itu Pemerintahan Provinsi Jawa Barat diharapkan kedepannya untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan ketepatan waktu dalam penyusunan dan penyajian laporan.

4. Dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas diperlukan adanya peningkatan dalam segi pemakaian media publikasi. Media yang digunakan selama ini masih kurang dan hanya sebatas pada media-media tertentu saja, yang tentu masih dirasa sangat kurang untuk memberikan informasi yang jelas dan terbaru. Informasi yang tersaji hendaknya meliputi semua aktifitas instansi mulai dari profil sampai dengan laporan keuangannya minimal setahun sekali pada media cetak seperti surat kabar, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan atas anggaran yang telah ditetapkan.